



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Branch Profit Tax

Pelunasan PPh Pasal 26 ayat (4)

PPh Yang Terutang Dari Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap

Direktorat P2Humas © 2026
Versi 20260507

1

Konsep Umum Branch Profit Tax



KETENTUAN UMUM BPT

DASAR HUKUM
Pasal 26 Ayat 4 UU PPh

Pengertian

Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu **Bentuk Usaha Tetap (BUT)** di Indonesia dikenai PPh Pasal 26 ayat (4)

Contoh Perhitungan

Penghasilan Kena Pajak BUT	Rp 17.500.000.000,00
Pajak Penghasilan:	
22% x Rp17.500.000.000,00=	Rp 3.850.000.000,00 (-)
Penghasilan Kena Pajak setelah pajak	Rp 13.650.000.000,00
Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang	
20% x Rp13.650.000.000 =	Rp 2.730.000.000,00

Apabila penghasilan setelah pajak sebesar **Rp13.650.000.000,00** tersebut **ditanamkan kembali** di Indonesia sesuai ketentuan PMK, atas penghasilan tersebut **tidak dipotong pajak**.

TARIF

20%

Atau berdasarkan **Tax Treaty (P3B)** sepanjang memenuhi ketentuan PMK mengenai tata cara pemanfaatan P3B

Penghitungan BPT dalam Hal Wajib Pajak Dikenai PPh Yang Bersifat Final dan Tidak Final

DASAR HUKUM
Lampiran PER-11/PJ/2025

Penghasilan Kena Pajak

▶ penghasilan neto komersial (**yang dikenai PPh yang bersifat final dan tidak final**) setelah ditambah/dikurangi penyesuaian fiskal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

PPh Terutang

▶ PPh bersifat final yang terutang **ditambah** PPh terutang BUT

Contoh Penghitungan

- (1) Penghasilan Bruto Komersial yang dikenai PPh Final
- (2) Biaya Terkait Penghasilan Komersial yg dikenai PPh Final
- (3) Penghasilan Neto Komersial yg dikenai PPh Final**
- (4) Penghasilan Bruto Komersial yang dikenai PPh Tidak Final
- (5) Biaya Terkait Penghasilan Komersial yg dikenai PPh Tidak Final
- (6) Penghasilan Neto Komersial yg dikenai PPh Tidak Final**
- (7) Total Penghasilan Neto Komersial (3)+(6)**
- (8) Koreksi Fiskal Positif (contoh: biaya yang tidak terkait 3M)
- (9) Penghasilan Kena Pajak BUT (7)+(8)**
- (10) PPh Final yang telah dipotong dan disetor sendiri
- (11) PPh BUT Tidak Final: 22% x Rp600.000.000,00
- (12) Total PPh Terutang**
- (13) Penghasilan Kena Pajak setelah pajak terutang (9)-(12)**
- (14) Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang**
20% x Rp18.338.000.000 =

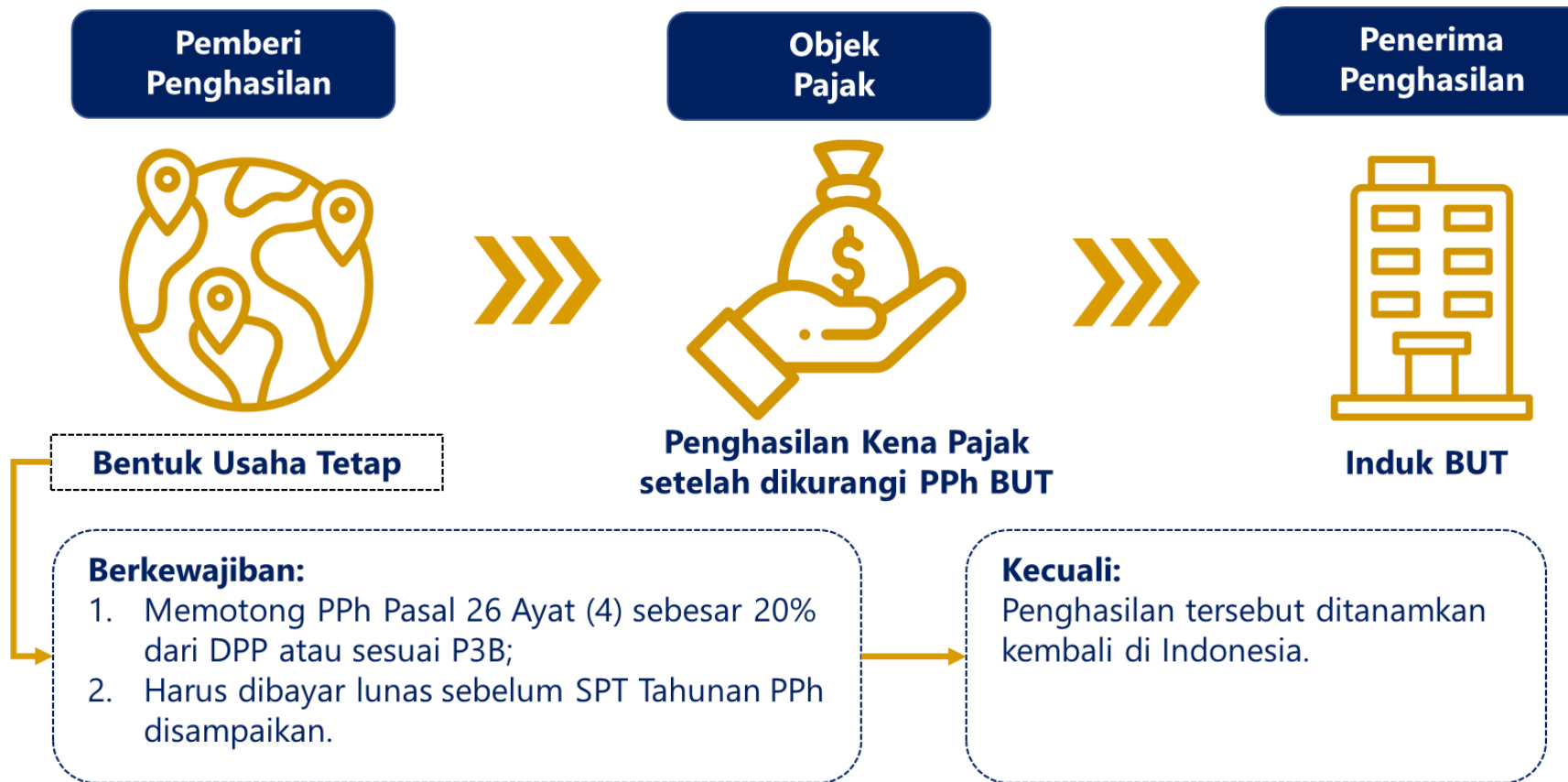
Rp 20.000.000.000,00
Rp 2.000.000.000,00 (-)
Rp18.000.000.000,00
Rp 1.000.000.000,00
Rp 400.000.000,00 (-)
Rp 600.000.000,00
Rp18.600.000.000,00
Rp 400.000.000,00 (+)
Rp19.000.000.000,00
Rp 530.000.000,00
Rp 132.000.000,00 (+)
Rp 662.000.000,00
Rp18.338.000.000,00

Rp 3.667.600.000,00

Catatan:

Biaya yang terkait Penghasilan Komersial yang dikenai PPh Final **tidak dilakukan koreksi fiskal**, mengingat atas penghasilannya menjadi objek pajak.

KONSEP PENGENAAN BPT



Saat Terutang:

Sebelum SPT Tahunan PPh Disampaikan,

Karena Objek Pajaknya adalah Penghasilan Kena Pajak setelah dikurangi PPh, dan jumlah Penghasilan Kena Pajak tersebut baru diketahui setelah adanya laporan keuangan, maka saat terutang harusnya tidak mendahului tanggal laporan keuangan.

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

Apabila Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap **ditanamkan kembali di Indonesia** dalam bentuk:

1

penyertaan **modal pada perusahaan yang baru didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;

2

penyertaan **modal pada perusahaan yang sudah didirikan** dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

3

pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau

4

investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

PENGECUALIAN PENGENAAN BPT

DASAR HUKUM
PMK-14/PMK.03/2011

Syarat Umum

- Penanaman Kembali harus dilakukan paling lambat pada **akhir tahun pajak berikutnya**; dan
- BUT **menyampaikan pemberitahuan tertulis** mengenai bentuk penanaman modal, realisasi penanaman kembali, dan/atau SMB komersial bagi perusahaan yang baru didirikan



Pemberitahuan bentuk dan realisasi melalui pengisian **lampiran L12-B** pada SPT Tahunan PPh Badan di Coretax

Syarat Khusus

1. penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
2. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;
3. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia; atau
4. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia.

- Aktif melakukan kegiatan usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak didirikan; dan
- Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal paling sedikit dalam jangka waktu 2 tahun sejak berproduksi komersial

- mempunyai kegiatan usaha aktif di Indonesia; dan
- Tidak boleh mengalihkan penyertaan modal paling sedikit 3 tahun sejak penyertaan modal.

Tidak boleh melakukan pengalihan paling sedikit 3 tahun sejak perolehan.

2

Cara Pelunasan BPT **Di Coretax**





Langkah-langkah pelunasan

Branch Profit Tax

Pada Aplikasi Coretax



Login & Impersonating
Akun Wajib Pajak



Input BPNR
eBupot



Buat Konsep SPT PPh Unifikasi
SPT PPh Unifikasi



Bayar dan Laporkan
SPT PPh Unifikasi

Bagian 1

Login & Impersonating Akun Wajib Pajak

● Login OP

- [1] ID Pengguna diisi dengan **NIK/NPWP 16 digit**
- [2] Kata sandi diisi sesuai dengan **password Coretax**
- [3] *Language* untuk **memilih Bahasa (en-US/ id-ID)**
- [4] Masukkan **Kode Keamanan (Captcha)**
- [5] Tekan tombol **Login**



Login

- 1 ID Pengguna
- 2 Kata Sandi
 
- 3 Pemilihan Bahasa
- 4  
- 5

Lupa Kata Sandi?

Pengguna Baru? [Daftar di sini](#)
[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)



Coretax DJP

Wajib pajak dapat mengakses tab **BACA SAYA** untuk informasi mengenai halaman login Coretax DJP.

[Lihat informasi penting di tab BACA SAYA](#)

Lakukan Impersonating

You are currently impersonating user: - ! [Redacted] 6

 Versi: 1.1.2-build-1855 id-ID [Redacted] Login terakhir: 30 Juli 2024 00:00:00 ➔

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Ikhtisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tinjauan 360 - Derajat Wajib Pajak

Unduh Ikhtisar Profil

Profil | Daftar Kode Billing Belum Dibayar | Saldo Saat Ini | SPT Belum Disampaikan | Jenis Pajak Terdaftar | Kasus Aktif | Fasilitas Aktif

Nama

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kegiatan Utama

Jenis Wajib Pajak

Kategori Institusi Pemerintah

Status NPWP

Tanggal Terdaftar

Tanggal Aktivasi

Status Pengusaha Kena Pajak

Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

BEA CUKAI

: Instansi Pemerintah

: Instansi Pemerintah Pusat

: Aktif

: 06 Februari 2023

: -

: ✖

: -

: Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I

Pada modul *role akses*, lakukan *impersonating* [6] ke akun BUT yang diwakili

PANCORAN, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN,
DKI Jakarta, Indonesia,
12750,
31.74.08.1003

Kontak Utama

Nomor Telepon Seluler : [Redacted]

Email : testingctas@kemenkeu.go.id

Klasifikasi Lapangan Usaha Utama

Kode Klasifikasi Lapangan Usaha : 84113

Deskripsi Klasifikasi Lapangan Usaha : LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI

www.pajak.go.id

Bagian 2 | Input BPNR eBupot

● Input BPNR - eBupot

The screenshot shows the DJP (Direktori Jenderal Pajak) portal interface. At the top, there is a header bar with the DJP logo, version information (Versi: 1.1.2-build-2094), language selection (id-ID), a 'Baru' (New) notification, and a search bar. The user is logged in as of 10 February 2026 20:46:17. Below the header, a navigation menu is displayed with various options: Portal Saya, e-Faktur, eBupot, Surat Pemberitahuan (SPT), Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, Manajemen Akses, Soal Sering Ditanya, and Pertukaran Informasi. The 'eBupot' menu item is highlighted with a red circle and the number 7. A dropdown menu is open under 'eBupot', showing several options: BPPU, BPNR, Penyetoran Sendiri, Pemotongan Secara Digunggung, BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap, BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri, BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir, BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir, Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap, and Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan. The 'BPNR' option is highlighted with a red circle and the number 8. A tooltip message appears next to 'Penyetoran Sendiri', stating: 'Gunakan menu ini untuk memotong/memungut PPh dari Wajib Pajak Non Residen'. On the right side of the page, there is a blue box with a quote icon and text about the deadline for submitting NPPN (Notifikasi Pemberitahuan Pajak) for certain taxpayers by March 31, 2026.

Portal Saya ▾ e-Faktur ▾ **7** eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi

BPPU

8 BPNR

Penyetoran Sendiri Gunakan menu ini untuk memotong/memungut PPh dari Wajib Pajak Non Residen

Pemotongan Secara Digunggung

BP 21 - Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap

BP 26 - Bukti Pemotongan Wajib Pajak Luar Negeri

BP A1 - Bukti Pemotongan A1 Masa Pajak Terakhir

BP A2 - Bukti Pemotongan A2 Masa Pajak Terakhir

Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap

Unggah Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Wajib Pajak **Orang Pribadi Usahawan dan Pekerja Bebas** (Dokter, Notaris, dll) dengan **omzet <4,8M** (satu tahun pajak) dapat melaporkan penghasilan neto dengan NPPN dengan menyampaikan pemberitahuan NPPN **paling lambat 31 Maret 2026** melalui Co
* WP yang memenuhi ketentuan penggunaan NPPN dalam penghitung

Pilih Modul “**eBupot**” [7], lalu pilih “**BPNR**” [8] untuk menginput bupot BPNR.

● Input BPNR - eBupot

 Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ? Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informa

BPNR

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

9 + Create eBupot BPNR Hapus Terbitkan

Monitoring Impor data Bulk Process

	Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tang
☐	April 2026 × ✓ 	 	Pilih Status ✓	

Tidak ada data yang ditemukan.

Klik "+ Create eBupot BPNR" [9] untuk menginput bupot BPNR.

● Input BPNR - eBupot

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak*

Status*

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas*

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Please select

April 2026

Maret 2026

Februari 2026

Januari 2026

Desember 2025

November 2025

Please select

[10] Pilih Masa Pajak sesuai dengan Saat Terutang Branch Profit Tax.

● Input BPNR - eBupot

 **djpe**

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ?

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

EBUPOT BPNR

Informasi Umum ▾

Masa Pajak*

April 2026 X ▾

Status*

NORMAL

Penghitungan Pajak Penghasilan ▾

Nama Fasilitas*

11 Please select ▾

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

Fasilitas Lainnya

Surat Keterangan Domisili (SKD)

Tanpa Fasilitas

[11] Pilih Jenis Fasilitas, jika menggunakan Tax Treaty (P3B) pilih **"Surat Keterangan Domisili (SKD)"**, jika tidak maka pilih **"Tanpa Fasilitas"**.

● Input BPNR - eBupot

 **djp**

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ?

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak*

April 2026

Status*

NORMAL

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas*

Surat Keterangan Domisili (SKD)

Receipt Number*

Nomor Identitas WP*

Name*

Nama Objek Pajak*

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

12

[12] Jika memilih fasilitas “**Surat Keterangan Domisili (SKD)**”, isikan nomor SKD WPLN yang telah terdaftar dalam sistem Coretax.

Pastikan **Periode SKD** yang digunakan sesuai dengan Masa Pajak Bupot.

● Input BPNR - eBupot

EBUPOT BPNR

Informasi Umum

Masa Pajak*

April 2026

×

▾

Status*

NORMAL

Penghitungan Pajak Penghasilan

Nama Fasilitas*

Tanpa Fasilitas

×

▾

Nomor Identitas WP*

13

Name*

14

Nama Objek Pajak*

Please select

▾

Jenis Pajak*

Kode Objek Pajak*

Sifat Pajak Penghasilan*

[13] Isi *tax identification number* Induk BUT yang menerima penghasilan.
[14] Isi nama Induk BUT yang menerima penghasilan.

● Input BPNR - eBupot

Nama Fasilitas*	Tanpa Fasilitas
Nomor Identitas WP*	123456
Name*	ABC LTD.
Address*	SINGAPORE
Negara*	Singapura
Tanggal Lahir	
Tempat Lahir	
Nomor Paspor	
Nomor KITAS/KITAP	
Nama Objek Pajak*	15 Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)
Jenis Pajak*	Pasal 26
Kode Objek Pajak*	27-105-01
Sifat Pajak Penghasilan*	Final
Penghasilan Bruto (Rp)*	16 100.000.000
Tingkat Penghasilan Neto yang Dianggap (%)*	100,00
Tarif (%) (BPNR)*	20,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	20.000.000

[15] Pilih "Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak (PPh Pasal 26)".

[16] Isi Penghasilan yang menjadi DPP.

● Input BPNR - eBupot

Pajak Penghasilan (Rp)*	20.000.000
KAP*	411127-110

Dokumen Referensi

Jenis Dokumen*

17

Dokumen Lainnya

X

▼

Nomor Dokumen*

18

123456

Tanggal Dokumen*

19

29-04-2026

📅

🗑️

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*

20

X

▼

21

Submit

22

Simpan Konsep

Go to
search

- [17] Pilih Jenis Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [18] Isi Nomor Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [19] Pilih Tanggal Dokumen yang menjadi dasar penerbitan bupot BPNR.
- [20] Isi NITKU pemotong PPh.
- [21] Klik "**Submit**" untuk membuat konsep Bupot.
- [22] Klik "**Simpan Konsep**" untuk menyimpan konsep Bupot.

● Input BPNR - eBupot

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ? Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Loading menu

EBUPOT BPNR NOT ISSUED

+ Create eBupot BPNR

Hapus

24 Terbitkan

Monitoring ▾

Impor data ▾

Bulk Process ▾

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
23 ☒		April 2026 Xv		Pilih Status ▾	
☒		April 2026		Disimpan	

<

1

>

10 ▾

[23] Klik kotak untuk menandai Bupot yang akan diterbitkan.

[24] Klik "Terbitkan" untuk menerbitkan Bupot.

www.pajak.go.id

● Input BPNR - eBupot

Portal Say
00100
NAMA
BPNR
Belum T
Telah Te
Tidak Va

Logo djp

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan* Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan* Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan **25**

26 Konfirmasi Tanda Tangan

Logo djp Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak

Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Pajak.

[25] Isikan kode *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik.

[26] Klik "**Konfirmasi Tanda Tangan**".

● Input BPNR - eBupot

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

BPNR

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPNR ISSUED

Monitoring Batal Bulk Process

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
☐		April 2026		Pilih Status	
☐	27 28 29	April 2026	260000034	Normal	Done

< 1 > 10

- [27] Klik untuk melihat detail data Bupot yang telah diterbitkan.
- [28] Klik untuk membetulkan Bupot yang telah diterbitkan.
- [29] Klik untuk unduh Bupot yang telah diterbitkan.

www.pajak.go.id

● Input BPNR - eBupot

 **djp**

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ?

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

BPNR

Belum Terbit

Telah Terbit

Tidak Valid

EBUPOT BPNR ISSUED

Monitoring ▾

Batal

Bulk Process ▾

↺

📄

📄

📄

🔍

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
☒		April 2026 Xv 🔍	🔍	Pilih Status ▾	🔍
30 ☒	  	April 2026	260000034	Normal	Done

< 1 >

10 ▾

- [30]** Klik untuk menandai, jika terdapat data Bupot yang ingin dibatalkan.
- [31]** Klik "**Batal**" jika ingin membatalkan Bupot yang telah diterbitkan.

Bagian 3

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi
SPT PPh Unifikasi

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

The screenshot displays the DJP web application interface. At the top, the header includes the DJP logo, version information (Versi: 1.1.2-build-2094), language selection (id-ID), a 'Baru' (New) button, and a login timestamp (Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17). Below the header is a navigation bar with various menu items: Portal Saya, e-Faktur, eBup, Surat Pemberitahuan (SPT), Pembayaran, Buku Besar, Layanan Wajib Pajak, Manajemen Akses, Soal Sering Ditanya, Pertukaran Informasi Perpajakan, and Aplikasi Eksternal. A dropdown menu is open under 'Surat Pemberitahuan (SPT)', showing options: Surat Pemberitahuan (SPT), Pencatatan, Dasbor Kompensasi, and Pengungkapan Ketidakbenaran SPT. The main content area shows a table with columns: Masa Pajak, Nomor Pemotongan, Status, and Status Tanda Tangan Elektronik. The table has one row with data: April 2026, 260000034, Normal, and Done. The table is filtered by 'April 2026' and 'Pilih Status'. The page number is 1 out of 10.

32 Surat Pemberitahuan (SPT)

33 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pencatatan

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

Monitoring

Batal

Bulk Process

		Masa Pajak ↑↓	Nomor Pemotongan ↑↓	Status	Status Tanda Tangan Elektronik ↑
☒		April 2026		Pilih Status	
☒	  	April 2026	260000034	Normal	Done

< 1 > 10

[32] Pilih Modul “**Surat Pemberitahuan (SPT)**”, lalu pilih “**Surat Pemberitahuan (SPT)**” [33] untuk membuat konsep SPT.

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

 **djpd**

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ? Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17 

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

34

 **Buat Konsep SPT**



	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak ▾	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▾	Pilih Masa Pajak ▾	

[34] Klik "Buat Konsep SPT" untuk membuat konsep SPT.

www.pajak.go.id

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

 **djp**

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru 

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17 

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT



Langkah 1. Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan

PBB

PPh Badan Migas Dolar Amerika Serikat

PPh Final Pengungkapan Harta Bersih

PPh Pasal 21/26

PPh Pasal 25 bagi BUMN/BUMD

PPh Pasal 25 bagi Bank

PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Masuk Bursa atau Wajib Pajak Lainnya

35

PPh Unifikasi

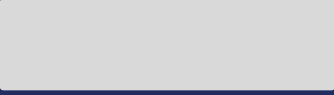
36

Lanjut

[35] Klik "PPh Unifikasi" untuk membuat konsep SPT PPh Unifikasi.

[36] Klik "Lanjut".

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

- 
- Surat Pemberitahuan (SPT)**
- Konsep SPT
 - SPT Menunggu Pembayaran
 - SPT Dilaporkan
 - SPT Ditolak
 - SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT



Langkah 2. Pilih periode pelaporan SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Masa PPh Unifikasi**

Periode dan Tahun Pajak *

37 April 2026 

[Kembali](#)

38 [Lanjut](#)

[37] Pilih Masa Pajak yang akan dibuat konsep SPT.
[38] Klik "**Lanjut**".

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

 **djp**

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru ?

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17 

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

Buat Konsep SPT

1

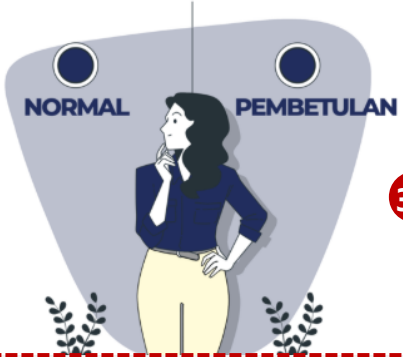
Pilih Jenis Pajak

2

Pilih periode pelaporan SPT

3

Pilih Jenis SPT



Langkah 3. Pilih Jenis SPT

Jenis Surat Pemberitahuan Pajak : **SPT Masa PPh Unifikasi**
Periode dan Tahun Pajak : **April 2026**

39

Model SPT *

Normal X ▾

40

 **Buat Konsep SPT**

[39] Pilih Model SPT "Normal".
[40] Klik "Buat Konsep SPT".

 www.pajak.go.id

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT Belum Disampaikan

Buat Konsep SPT

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak	
41	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	April 2026	

[41] Pilih Icon Pensil untuk mengedit SPT.

Logo

djp

Versi: 1.1.2-build-2094 id-ID Baru

Login terakhir: 10 February 2026 20:46:17

Portal Saya e-Faktur eBupot Surat Pemberitahuan (SPT) Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

www.pajak.go.id

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

[Portal Saya](#) [e-Faktur](#) [eBupot](#) [Surat Pemberitahuan \(SPT\)](#) [Pembayaran](#) [Buku Besar](#) [Layanan Wajib Pajak](#) [Manajemen Akses](#) [Soal Sering Ditanya](#) [Pertukaran Informasi Perpajakan](#) [Aplikasi Eksternal](#)

SPT MASA PPh UNIFIKASI

IND **42**

DAFTAR-I

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

DAFTAR-I

Masa Pajak

April 2026

NPWP

0010014504081000

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

TABEL I. BPPU

↺

📄

📁

📄

🔍

NO.	NIK/NPWP ↑↓	NAMA ↑↓	NOMOR BUKTI POTONG	TANGGAL BUKTI POTONG ↑↓	JENIS PAJAK ↑↓	KODE OBJEK PAJAK ↑↓	OBJEK PA

[42] Klik “Daftar-I” untuk memastikan daftar bupot BPNR yang telah diterbitkan telah prepopulasi di “Tabel II. BPNR”.

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

TABEL II. BPNR

↺

📄

📄

📄

🔍

↕	JENIS PAJAK ↕	KODE OBJEK PAJAK ↕	OBJEK PAJAK ↕	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp) ↕	TINGKAT (%) ↕	PAJAK PENGHASILAN (Rp) ↕	FASILITAS PERPAJAKAN ↕
📅							Pilih FASILITAS PERPAJAKAN
Jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah dengan Menggunakan Metode Pembayaran Langsung							0
Jumlah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah							0
Jumlah Pajak Penghasilan Dibayar dengan Menggunakan Metode Pembayaran Langsung							0
Jumlah Pajak Penghasilan yang Harus Dibayar							20.000.000

[43] Pastikan Bupot BPNR yang telah diterbitkan telah terpopulasi ke dalam “Tabel II. BPNR”.

[44] Pastikan Jumlah PPh yang harus dibayar telah sesuai.

● Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

SPT MASA PPH UNIFIKASI

INDUK

DAFTAR-I

DAFTAR-II

LAMPIRAN-I

▼ A. IDENTITAS PEMOTONG

Masa Pajak

April 2026

Status Penyampaian

NPWP

0010014504081000

Nama Lengkap

NAMA0010014504081000

Alamat

GEDUNG BAKRIE TOWER LANTAI 23 RASUNA EPICENTRUM, JL. HR. RASUNA SAID - NO. -, RT 000, RW 000, S

Nomor Telepon

+6281999760161

▼ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL		PAJAK DARI SP JULKAN	PPH KURANG BAYAR / LEBIH BA YAR KARENA PEMBETULAN
		[45] Klik Pilihan “Induk”.		

Buat Konsep SPT PPh Unifikasi

✓ B. PAJAK PENGHASILAN

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN		PPh DITANGGUNG PEMERINTAH	JUMLAH PPh DIBAYAR	JUMLAH PPh DIBAYAR DARI SP T YANG DIBETULKAN	PPh KURANG BAYAR / LEBIH BAYAR KARENA PEMBETULAN
		SETOR SENDIRI	PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN				
1	✓ Pasal 4 Ayat 2	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-402	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-403	0	0	0	0	0	0
2	✓ Pasal 15	0	0	0	0	0	0
	KJS:411128-600	0	0	0	0	0	0
	KJS:411129-600	0	0	0	0	0	0
3	✓ Pasal 22	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-100	0	0	0	0	0	0
	KJS:411122-900					0	0
	KJS:411122-910					0	0
4	✓ Pasal 23					0	0
	KJS:411124-100	0	0	0	0	0	0
5	✓ Pasal 26	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
	KJS:411127-110	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0
TOTAL OF INCOME TAX		0	20.000.000	0	20.000.000	0	

[46] Pastikan Jumlah PPh Pasal 26 yang akan dibayar telah sesuai.

46

Bagian 4

Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

▼ C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

47 ☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Saya menyatakan bahwa apa yang telah Saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas.

Penandatangan ☒ Wajib Pajak ☐ Kuasa Wajib Pajak

NPWP

Nama Tanda Tangan

Tanda Tangan

48 Bayar dan Lapor

[47] Ceklis Pernyataan.
[48] Klik **"Bayar dan Lapor"**.

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Penyedia Penandatanganan*

Kode Otorisasi DJP

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

49

50

Konfirmasi Tanda Tangan

[49] Isi *Passphrase* Tanda Tangan Elektronik.

[50] Klik “**Konfirmasi Tanda Tangan**”.

Jika Wajib Pajak tidak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka sistem akan otomatis membuat **Kode Billing** Pembayaran PPh, tapi jika Wajib Pajak memiliki saldo deposit pajak yang cukup maka akan muncul opsi apakah akan menggunakan saldo **deposit** untuk melunasi pajak atau membuat Kode Billing.

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
041996189185473

NPWP : [REDACTED]
NAMA : [REDACTED]
ALAMAT : [REDACTED]
ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, INDONESIA 12940
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 20.000.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411127-110	04042026	-	-	Rp20.000.000,00
TOTAL				Rp20.000.000,00
Terbilang: Dua Puluh Juta Rupiah				

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 041996189185473
MASA AKTIF : 07/05/2026 02:28:16



Lakukan Pembayaran melalui *Collecting Agent* meliputi bank persepsi, pos persepsi, dan Lembaga persepsi lainnya

● Bayar dan Lapor SPT PPh Unifikasi

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

51 SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan



SPT yang Disampaikan

Buat Konsep SPT



	Jenis Pajak	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Masa Pajak ↑↓	NOP
	Pilih Jenis Pajak ▼	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ▼	Pilih Masa Pajak ▼	
52   	PPh Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	April 2026	Normal
[51] SPT akan otomatis menjadi telah dilaporkan ketika Pajak Kurang Bayar telah dilunasi melalui deposit pajak atau pembayaran Kode Billing . [52] Wajib Pajak dapat melihat kembali SPT yang telah disampaikan, unduh tanda terima pelaporan SPT, atau unduh SPT bagian Induk.				

www.pajak.go.id

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Pindai di Sini

Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini

Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini

Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id





Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200